

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah gerbang keberhasilan dalam kehidupan (Hamka, 1987). Ini berarti tanpa pendidikan manusia tidak akan berhasil dalam hidupnya. Pendidikan bukan hanya berarti harus sekolah, akan tetapi lebih kepada adanya usaha untuk menambah ilmu agar mampu menata langkah dalam hidup menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan berarti pula ajaran kebiasaan, etika, norma, dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan agama dan lingkungan. Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam kehidupan semua manusia yang dilakukan dengan penuh kesadaran, apapun dan bagaimanapun keadaan fisik, ekonomi, sosial, budaya dan agamanya.

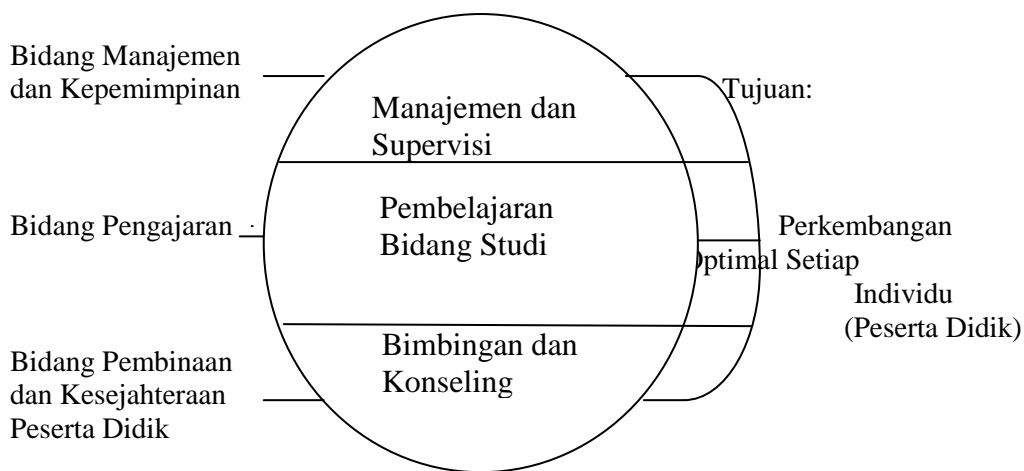
Hak mendapat pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1, bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ini jelas menjadi dasar bagi pemerataan pendidikan di Indonesia yang tidak boleh memihak pada golongan tertentu. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya, baik tingkat nasional maupun internasional, agar pendidikan dapat diakses oleh semua orang, terutama anak usia sekolah. Legalitas upaya pemerataan pendidikan pada tingkat nasional antara lain; disepakatinya Deklarasi Bandung pada tahun 2004, dan Rekomendasi Bukittinggi pada tahun 2005. Perkembangan pendidikan yang terjadi di tanah air merupakan dukungan bagi berbagai upaya tingkat internasional yang diawali dengan konferensi dunia atas prakarsa UNESCO di Jomtien, Thailand pada tahun 1990 yang menghasilkan dua tujuan utama, yaitu; (1) membawa semua anak masuk sekolah, (2) memberikan semua anak pendidikan yang sesuai. Dilanjutkan pada tahun 1994 tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni bertempat di Salamanca, Spanyol diselenggarakan kembali Konferensi Internasional diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang mewakili 92 negara dan 25 organisasi internasional dengan membahas materi Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) dan hasilnya terkenal dengan nama Pernyataan Salamanca yang berisi enam hal penting tentang pendidikan inklusif, diantaranya: pendidikan adalah hak semua anak untuk bersekolah di komunitas rumahnya dalam kelas-kelas inklusif, dan pengayaan serta manfaat bagi mereka akan diperoleh melalui pelaksanaan pendidikan inklusif. Menyadari akan

pentingnya pendidikan maka diadakan kembali pertemuan *World Education Forum* di Dakar, Senegal, dikenal dengan komitmen Dakar pada tahun 2000 (Fasli Djalal, 2002) berisikan enam tujuan pendidikan, tetapi ada dua hal yang paling penting, yaitu: meningkatkan dan memperluas pendidikan anak-anak secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung, dan menghilangkan isu gender. Hal ini jelas mengisyaratkan bahwa masyarakat internasional memperhatikan pemerataan pendidikan bagi semua anak tanpa kecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan di Indonesia dapat dimaknai dalam dua aspek penting yaitu konsep dasar dan fungsi pendidikan yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih jelas lagi pada Bab VI Pasal 32 Ayat 1 yang memaparkan tentang pendidikan khusus yang merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus bukan saja untuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa saja, akan tetapi yang tidak mampu dari segi ekonomipun termasuk anak yang membutuhkan pendidikan khusus, seperti yang dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2. Melihat uraian Pasal 32 tersebut sejalan dengan Pernyataan Salamanca mengenai pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, baik yang temporer maupun permanen.

Menindaklanjuti Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tersebut lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009, dimana poin **b** menjelaskan: bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Keberhasilan pendidikan yang bermutu, efektif dan ideal adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utama secara sinergi, yaitu Manajemen dan Supervisi, Pembelajaran bidang studi, dan Bimbingan dan Konseling. Pendidikan yang hanya melaksanakan pembelajaran bidang studi dengan mengabaikan bimbingan dan konseling, hanya akan menghasilkan peserta didik yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian. Untuk menggambarkan sinergi tiga bidang kegiatan utama dalam pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini. (Naskah Akademik ABKIN; Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, 2007).

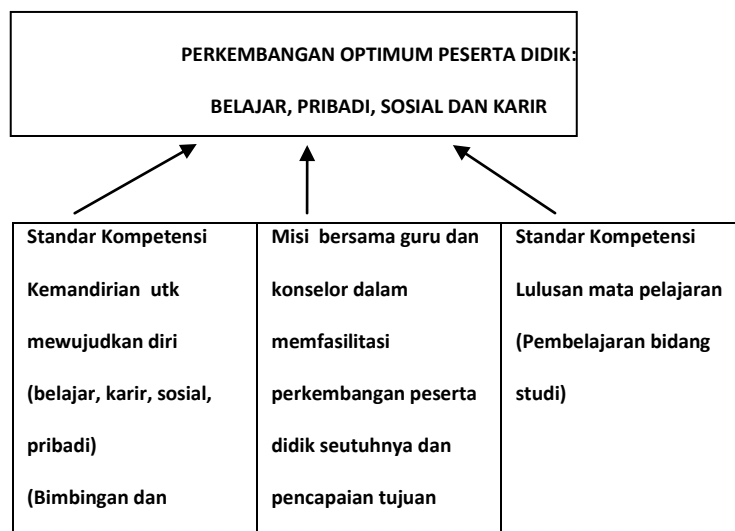


Gambar 1.1 Tiga bidang Kegiatan Utama dalam Pendidikan

Tugas mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor, dan tenaga pendidik lainnya sebagai mitra kerja, sementara itu masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam hubungan fungsional kemitraan (kolaboratif) antara guru bimbingan dan konseling/konselor dengan guru mata pelajaran, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan (*referral*). Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru mata pelajaran pada saat pembelajaran dirujuk kepada guru bimbingan dan konseling/konselor untuk penanganannya, demikian pula masalah yang ditangani guru bimbingan dan konseling/konselor dirujuk kepada guru mata pelajaran untuk menindaklanjutinya apabila itu terkait dengan proses pembelajaran bidang

studi. Masalah kesulitan belajar peserta didik sesungguhnya akan lebih banyak bersumber dari proses pembelajaran itu sendiri. Ini berarti bahwa di dalam pengembangan dan proses pembelajaran bermutu, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling perlu mendapat perhatian guru mata pelajaran, dan sebaliknya, fungsi-fungsi pembelajaran mata pelajaran perlu mendapat perhatian guru bimbingan dan konseling/konselor. Kolaborasi yang baik antara guru bimbingan dan konseling/konselor dan guru mata pelajaran menghasilkan perkembangan optimum peserta didik.

Kolaborasi guru bimbingan dan konseling/konselor dan guru mata pelajaran dapat dijelaskan pada Gambar 2 di bawah ini. (Naskah Akademik ABKIN; Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, 2007).



Konseling)	pendidikan nasional	
WILAYAH KONSELOR	KOLABORASI KONSELOR DENGAN GURU/PIHAK LAIN	WILAYAH GURU

Gambar 1.2 Kolaborasi guru BK/konselor dan guru mata pelajaran

Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan, karena setiap peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan (*guidance*) agar memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya dan lingkungannya serta pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya, serta konseling, bagi peserta didik yang memiliki masalah untuk dibantu dicarikan solusi pemecahannya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bimbingan. Implementasi bimbingan dan konseling di Sekolah/ Madrasah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik, yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir; atau terkait dengan pengembangan pribadi peserta didik sebagai makhluk *biopsikososiospiritual* (biologis, psikis, sosial, dan spiritual).

Aspek-aspek potensi peserta didik dikembangkan dengan layanan bimbingan dan konseling komprehensif, yaitu layanan dasar yang berfungsi preventif (pencegahan), layanan responsif untuk membantu peserta didik memecahkan masalah (pribadi, sosial, belajar, karir) yang dihadapinya pada saat ini dan memerlukan pemecahan segera, layanan perencanaan individu untuk memfasilitasi peserta didik secara individual di dalam merencanakan masa depannya berkenaan dengan kehidupan akademik maupun karir, dan dukungan sistem yaitu kegiatan yang terkait dengan dukungan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), kolaborasi atau konsultasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu peserta didik, pelatihan pembelajaran bernuansa bimbingan dan

konseling bagi guru mata pelajaran, termasuk pengembangan kemampuan guru bimbingan dan konseling/konselor secara berkelanjutan sebagai profesional.

Layanan bimbingan dan konseling diperuntukan bagi semua (*guidance and counseling for all*) dan oleh karena itu tidaklah tepat jika orientasinya hanya kepada pemecahan masalah, melainkan mencakup orientasi pengembangan (*developmental*) dan pemeliharaan (*maintanance*) secara menyeluruh. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya memfasilitasi perkembangan individu (dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir) ke arah kemandirian (dalam hal menetapkan pilihan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan sendiri) untuk mewujudkan diri (*self-realization*) dan mengembangkan kapasitas (*capacity development*).

Prinsip bimbingan dan konseling untuk semua mengandung arti bahwa target populasi layanan bimbingan dan konseling termasuk para peserta didik berkebutuhan khusus. Setiap peserta didik berkebutuhan khusus perlu diketahui kondisi fisik dan psikologisnya oleh semua guru dan komponen sekolah, terutama guru bimbingan dan konseling, agar kebutuhan khususnya dalam menjalani pendidikan dapat dipenuhi secara maksimal. Kenyataan di SMA Negeri 4 Bandung, sebagai sekolah inklusif, belum melaksanakan pemenuhan kebutuhan seluruh peserta didik secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang belum menggunakan asesmen kebutuhan sebagai dasar pembuatan program pembelajaran dan juga program bimbingan dan konseling. Pembelajaran dan layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan hanya berdasarkan intuisi guru dan materi yang telah dilaksanakan tahun pelajaran sebelumnya diberikan kembali pada jenjang yang sama tanpa melalui evaluasi secara menyeluruh. Ini berarti bahwa pembelajaran dan layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 belum memperhatikan keberagaman siswa sehingga dapat menimbulkan hasil belajar yang tidak optimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan.

Penulis sebagai salah satu guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 Bandung merasa berkewajiban untuk memberi masukan dengan melakukan penelitian tentang apa saja kebutuhan peserta didik dalam mengoptimalkan hasil belajarnya agar dapat mengantisipasi hambatan belajar, terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Layanan bimbingan belajar, sebagai salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yang berfungsi sebagai upaya dalam mengantisipasi hambatan belajar harus dapat

menjadi alat dalam mewujudkan keberhasilan belajar, artinya pelaksanaan layanan bimbingan belajar harus dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik secara individual. Pada kenyatannya layanan bimbingan belajar di SMA Negeri 4 Bandung, baik untuk peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik reguler, selama ini belum mengakomodasi keragaman kebutuhan seluruh peserta didik. Oleh karena itu penulis akan menelaah dengan melakukan penelitian untuk mengetahui seperti apa program layanan bimbingan belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik di SMA Negeri 4 Bandung dan berharap hasil penelitian dapat pula dipergunakan oleh semua sekolah inklusif tingkat menengah atas.

## B. Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk pada berbagai pernyataan dan komitmen, baik tingkat internasional maupun nasional tentang hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak tanpa kecuali, berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya, termasuk anak berkebutuhan khusus, menuntut adanya sekolah inklusif.

Prinsip dasar sekolah inklusif adalah selama memungkinkan semua anak sebaiknya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang mungkin ada pada mereka, akan tetapi pada proses pembelajaran di SMA Negeri 4 Bandung sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif belum mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus yang dalam hal-hal tertentu memerlukan layanan khusus, termasuk layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling untuk peserta didik berkebutuhan khusus bukan berarti mengeksklusifkan mereka, namun untuk memberikan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah agar jangan sampai terjadi hambatan dalam proses pendidikannya.

Dari hasil pengamatan, keluhan dan laporan dari guru mata pelajaran kepada guru bimbingan dan konseling, serta saling tukar informasi diantara guru-guru mata pelajaran tentang berbagai hambatan dalam proses pembelajaran, terungkap berbagai masalah belajar yang dialami peserta didik di SMA Negeri 4 Bandung, antara lain:

1. Hasil belajar tidak sesuai dengan ketentuan kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah. Hal ini terungkap dari daftar nilai raport tiap akhir semester terdapat beberapa peserta didik, di tiap kelas dan mata pelajaran tertentu, mendapat nilai kurang dari nilai minimal yang harus dicapai.
2. Banyak yang mengeluh tidak mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, karena terlalu banyak tugas dan tidak seimbang dengan rentang waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya.
3. Sering tidak hadir dengan alasan sakit, kadang-kadang tidak memberikan surat keterangan sakit dari dokter. Pemberitahuan dari orang tua atau dari yang bersangkutan disampaikan hanya melalui pesan singkat yang diterima wali kelas atau guru bimbingan dan konseling.
4. Banyak yang ketagihan game on line sehingga menyita waktu belajar di rumah, bahkan sampai bolos sekolah.
5. Situasi belajar yang kurang kondusif.
6. Keluhan tentang fasilitas belajar yang dimiliki di rumah kurang memadai dan fasilitas belajar yang ada di sekolah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan.
7. Memiliki kelompok bermain yang tidak menunjang terhadap peningkatan kemampuan belajar.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah inklusif tidak memilah peserta didik, walaupun pada kenyataan tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan antara layanan kepada peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus, terutama pemberian layanan bimbingan belajar dalam membantu tercapainya keberhasilan belajar. Dari fenomena ini memperlihatkan bahwa perlu adanya program layanan bimbingan belajar dalam setting pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian Djadja Rahardja (2010: 152) menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif membutuhkan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi berbagai masalah, salah satunya adalah masalah belajar. Oleh karena itu masalah utama dalam penelitian ini adalah: “Seperti apa program layanan bimbingan belajar dalam setting pendidikan inklusif?”



#### D. Pertanyaan Penelitian

Untuk menjabarkan rumusan masalah di atas, perlu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh apa saja yang dapat menimbulkan masalah belajar bagi peserta didik di kelas inklusif ?
2. Bagaimana layanan bimbingan belajar yang selama ini dilaksanakan dalam setting pendidikan inklusif ?
3. Seperti apa rumusan program layanan bimbingan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik di sekolah inklusif ?

#### E. Tujuan Penelitian

##### 1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menghasilkan program layanan bimbingan belajar bagi peserta didik di sekolah inklusif.

##### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

- a. Berbagai pengaruh yang dapat menimbulkan masalah belajar bagi peserta didik di kelas inklusif.
- b. Layanan bimbingan belajar yang selama ini dilaksanakan.
- c. Efektivitas program layanan bimbingan belajar bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

#### F. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh, adalah :

- a. Adanya program layanan bimbingan belajar yang dapat digunakan bagi seluruh peserta didik di sekolah inklusif.
- b. Memudahkan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan belajar bagi seluruh peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

## 2. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang ingin diperoleh bagi sekolah inklusif dan para akademisi yang bergerak di bidang pendidikan, adalah :

- a. Memberi tambahan pengetahuan tentang bagaimana layanan bimbingan belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
- b. Menemukan bentuk layanan bimbingan belajar yang dapat digunakan bagi berbagai kebutuhan belajar peserta didik.
- c. Memberi dasar bagi peneliti selanjutnya dalam menemukan hal-hal baru berkaitan dengan memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

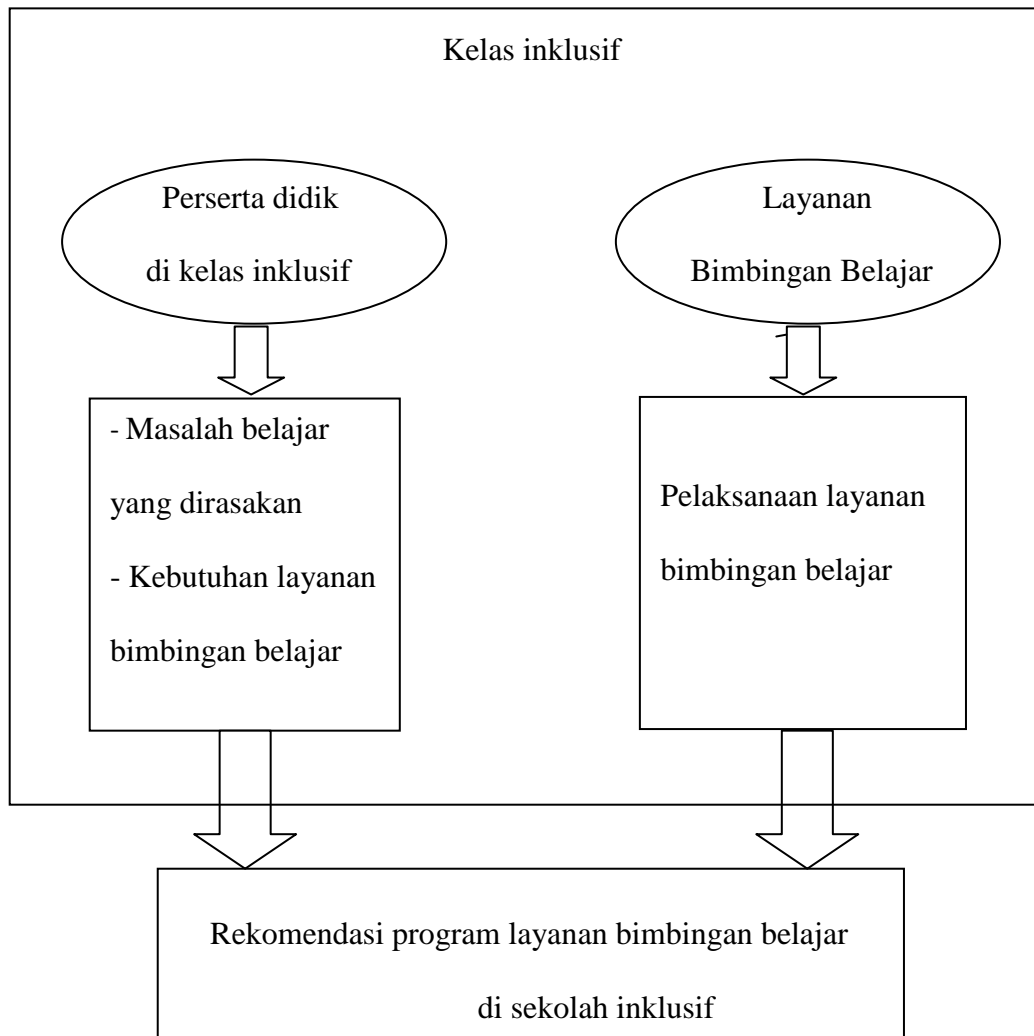
## G. Kerangka Penelitian

Pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik berkebutuhan khusus, karena apabila mereka mendapat pendidikan di sekolah khusus mungkin akan menimbulkan rasa rendah diri yang dapat berpengaruh terhadap perasaan dan pikirannya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Rasa rendah diri berpengaruh terhadap motivasi anak untuk belajar dan ada kecenderungan untuk tertinggal dalam perkembangan mental dan belajarnya (Aefsky, F., 1995:5).

Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam upaya mencapai keberhasilan pendidikan. Demikian pula di sekolah inklusif sangat dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling, yang salah satu layanan pentingnya adalah layanan bimbingan belajar untuk mengantisipasi hambatan dalam belajar agar dapat mencapai keberhasilan belajar secara optimal, terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Kenyataan di SMA Negeri 4 Bandung, sebagai sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif, program layanan bimbingan belajar yang dibuat sama dengan di sekolah reguler dan tidak menyatakan secara eksplisit bahwa program tersebut dapat juga digunakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga pelaksanaan layanan bimbingan belajar yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik pada umumnya. Oleh karena itu ada kemungkinan hasil layanan bimbingan belajar yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus kurang optimal sehingga dapat menimbulkan hambatan belajar atau kegagalan dalam mencapai keberhasilan belajar.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan dalam kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.3 Kerangka Penelitian